

PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BOGOR

Mirna Pratami¹, Rita Rahmawati², Irma Purnamasari³

¹²³ Program Administrasi Publik, mirnapratami2018@gmail.com,
rita.rahmawati@unida.ac.id, irma.purnamasari@unida.ac.id

ABSTRAK

Partisipasi merupakan hal yang paling penting dalam pelaksanaan pemilu. Pemilihan Umum (Pemilu) yaitu sarana demokrasi demi terwujudnya pemerintah negara yang berkedaulatan rakyat. Untuk mewujudkan pemerintahan negara yang dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat, pemerintah harus dibentuk melalui sistem pemilihan umum dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya tingkat kesadaran masyarakat belum dapat dikatakan optimal dalam berpartisipasi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Bogor. Metode yang digunakan ialah metode dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Teknik pengambilan sample pada penelitian ini dengan Accidental Sampling untuk 17 orang pegawai KPU Kabupaten Bogor dan 100 orang responden masyarakat yang berasal dari Kecamatan Ciawi. Hasil penelitian ini dapat diketahui dengan menggunakan rumus Taro Yamane dan perhitungan dengan rumus Weight Mean Score (WMS). Hasil dari rekapitulasi perhitungan angket dengan operasionalisasi variabel langkah-langkah strategi menurut Chandel (dalam Salusu 2015:64) dan partisipasi politik masyarakat (Budiardjo 208:367), maka dengan hasil perhitungan dari responden pegawai 3,76 dengan kategori BAIK. Sedangkan berbeda dengan hasil dari responden masyarakat 3,55 dengan hasil kategori BAIK. Oleh karena itu strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor telah dilaksanakan dengan baik.

Kata Kunci: Strategi, Partisipasi, Pemilihan Umum (Pemilu).

PENDAHULUAN

Pemilihan umum ialah rangkaian kegiatan kedaulatan untuk rakyat dengan cara menyusun pemerintahan dengan tujuan menampung suara dan kepentingan suatu negara. Ada suatu konsep pemerintahan yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan makna bahwa suatu negara dapat berjalan pemerintahannya karena kedaulatan tertingginya berada ditangan rakyat. Oleh sebab itu, pemilu adalah suatu langkah dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Di Indonesia, pemilihan umum atau

pemilu merupakan serangkaian program pemerintah untuk sarana dalam memilih calon pemimpin dalam 5 tahun sekali, karena itu pemilihan umum dikatakan pesta demokrasi untuk rakyat. Dengan demikian masyarakat harus ikut serta berpartisipasi aktif dalam kekuasaan berdasarkan konsep demokrasi dimana keadulatan berada di tangan rakyat.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021. Pemilihan umum atau (Pemilu) adalah sebuah syarat mutlak bagi penyelenggaraan pemerintah untuk menjalankan negaranya, pemilu juga merupakan sebuah serangkaian kegiatan berpolitik yang didalamnya berkaitan dengan kepentingan politik yang ditampung atau adanya partisipasi aspirasi dari masyarakat.

Kabupaten Bogor adalah salah satu Kabupaten yang jumlah pemilihnya terbesar di Provinsi Jawa Barat dengan pengguna hak pilih mencapai 3.889.441 pemilih. Luas wilayah Kabupaten Bogor sekitar 2.664 km persegi. Terdiri dari 40 Kecamatan dengan Tempat Pemungutan Suara (TPS) mencapai 15.000. Hal tersebutlah yang menyebabkan partisipasi pemilih menjadi kebutuhan yang penting dalam penyelenggaraan pemilu. Keikutsertaan masyarakat dalam hal berpolitik merupakan cara memberikan pengaruh kepada keputusan pemerintah nantinya. Dimana semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pemilu menandakan bahwa masyarakat memiliki rasa peduli yang tinggi kepada negaranya.

Namun dalam pelaksanaan pemilu tidak lepas dari kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya, hal tersebut dapat dilihat di Kecamatan Ciawi yang pemilihnya mencapai 82.781 dari total jumlah 3.889.441 pemilih di Kabupaten Bogor. Selain itu jika dibandingkan dengan pemilu tahun 2019 dengan total Daftar Pemilih Tetap 74.021, Kecamatan Ciawi mengalami kenaikan Daftar Pemilih Tetap sebanyak 8.760.

Meskipun pemilih mengalami kenaikan jumlahnya tetapi tingkat partisipasi pemilih masih bisa dikatakan belum maksimal terbukti dari target partisipasi tahun

2024 di Kecamatan Ciawi yang semula ditargetkan 90% partisipasi dan baru tercapai 87% tentunya hal tersebut bisa diakibatkan oleh beberapa faktor antara lain kurangnya kesadaran politik masyarakat, sosialisasi yang masih kurang merata, Aspek teknis yang tidak memudahkan, rendahnya kesadaran pemilu dan dukungan pemerintah yang kurang maksimal.

Untuk dapat memaksimalkan tingkat partisipasi suatu program tidak terlepas dari partisipasi atau peran masyarakat dalam membangun wilayahnya sendiri (Rohimat et al, 2017). Sedangkan untuk meningkatkan kualitas dari suatu pelayanan publik diperlukan membangun kepercayaan masyarakat terlebih dahulu penyedia layanan publik dengan menjadikan saran masyarakat sebagai bahan perbaikan (Salbiah Euis et al., 2020)

Oleh karena itu KPU Kabupaten Bogor selaku penyelenggara dalam kegiatan pemilu dirasa perlu juga melakukan serangkaian cara dan kegiatan dalam meningkatkan partisipasi pemilih untuk pemilu tahun 2024. Terlebih di tingkat Kecamatan Ciawi, meskipun Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Ciawi pernah memperoleh penghargaan sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terbaik dalam melakukan laporan kinerja dan kategori terbaik dalam laporan sosialisasi tentu saja hal tersebut dalam pelaksanaannya masih perlu mendapatkan bantuan dari seluruh pihak baik penyelenggara pemilu ataupun pelaksana pemilu untuk meningkatnya partisipasi pemilih.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum(Pemilu) Tahun 2024 di Kabupaten Bogor”.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2019) metode kuantitatif adalah metode penelitian berdasarkan filsafat positivisme, dimana sebagai suatu metode ilmiah scientific karena kaidah

telah dipenuhi secara ilmiah, konkrit atau empiris, obyektif, terukur, rasional dan juga sistematis.

Populasi pada penelitian adalah unsur dari pegawai KPU Kabupaten Bogor yang berjumlah 17 pegawai dan masyarakat Kecamatan Ciawi dengan jumlah 100 orang. Teknik *Sampling Incidentan/Accidental Sampling* digunakan untuk menentukan sampel dari masyarakat, dimana untuk menentukan sample berdasarkan siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan dirasa cocok untuk dijadikan sumber data dalam penelitian. Berikutnya, untuk jumlah sample pegawai dengan menggunakan teknik yang sama dengan menggunakan rumus Yamane.

Kemudian data penelitian dikumpulkan dengan studi kepustakaan (artikel, jurnal dan internet) dan studi lapangan (observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi). Skala Likert digunakan peneliti untuk mengetahui bagaimana jawaban dari responden terhadap partisipasi pemilih dalam pemilu Kabupaten Bogor Tahun 2024. Dimana jawaban memiliki nilai dari rentan Sangat Baik sampai Sangat Tidak Baik, hal ini dapat ditunjukkan skala likert. Dan untuk mendapatkan skor rata-rata, dari hasil kuesioner dapat dianalisis dengan menggunakan rumus WMS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1

Rekapitulasi jawaban dari responden pegawai dan masyarakat terhadap variabel Langkah-Langkah Strategi dan Partisipasi Politik Masyarakat

Variabel	Dimensi	Indikator	Pegawai		Masyatakat	
			Rata-Rata	Kategori	Rata-rata	Kategori
Langkah-Langkah Strategi	Formulasi Jangka Panjang	1. Perencanaan Sosialisasi	4,24	Sangat Baik	4,40	Sangat Baik
		2. Pendidikan Politik	4,12	Baik	4,19	Baik
	Rata-Rata			4,18	Baik	4,29

	Pemilihan Tindakan	1. Metode sosialisasi	4,18	Baik	4,20	Baik
	Rata-Rata		4,18	Baik	4,20	Baik
	Alokasi Sumber Daya	1. Staf yang memadai	1,88	Tidak Baik	3,69	Baik
		2. Staf yang memadai	3,24	Cukup Baik	4,00	Baik
		3. Finansial	3,12	Cukup Baik	3,44	Baik
		4. Bahan Baku	3,35	Baik	3,72	Baik
		5. Sarana dan Prasarana	3,18	Cukup Baik	3,72	Baik
		6. Teknologi dan Informasi	3,71	Baik	3,38	Baik
Rata-Rata		2,99	Cukup Baik	3,72	Baik	
Partisipasi Politik Masyarakat	Memberikan Suara dalam Pemilihan Umum	1. Berpartisipasi dalam pemilihan umum	4,65	Sangat Baik	3,92	Baik
		2. Keterlibatan Masyarakat dalam kampanye politik	3,18	Baik	2,91	Cukup Baik
	Rata-Rata		3,91	Baik	3,41	Baik
	Menghadiri Rapat Umum	1. Rapat Panitia	3,71	Baik	3,53	Baik
		2. Rapat Tim Sukses	2,94	Cukup Baik	2,61	Cukup Baik
		3. Menghadiri pertemuan atau diskusi politik	2,94	Cukup Baik	2,92	Cukup Baik
	Rata-Rata		3,19	Cukup Baik	3,02	Cukup Baik
Menjadi anggota	1. Menjadi anggota partai	3,24	Cukup Baik	2,43	Tidak Baik	

	suatu partai atau kelompok kepentingan	2. Menjadi anggota kelompok kepentingan	3,76	Baik	3,39	Baik
		3. Menjadi pengawas TPS	4,00	Cukup Baik	2,77	Cukup Baik
	Rata-Rata		3,67	Baik	2,82	Cukup Baik
	Mengadakan hub dengan pejabat atau anggota parlemen	1. Berkomunikasi dan berinteraksi dengan pejabat pemerintah	4,24	Sangat Baik	3,44	Baik
	Rata-Rata		4,24	Sangat Baik	3,44	Baik
	Total Rata-Rata		3,76	Baik	3,55	Baik

1. Strategi KPU Untuk Meningkatkan Partisipasi

Berdasarkan variabel langkah-langkah strategi yang memiliki tiga dimensi yakni dimensi formulasi jangka panjang, pemilihan tindakan dan alokasi sumber daya dan terbagi menjadi berbagai indikator dapat menunjukkan bahwa Strategi KPU dengan studi kasus di Kecamatan Ciawi sudah berjalan dengan optimal. Hal ini diketahui melalui rekapitulasi jawaban dari responden pegawai KPU dengan mendapatkan nilai rata-rata 2,99 kategori "Cukup Baik". Untuk jawaban dari responden masyarakat mendapatkan nilai rata-rata 3.72 dengan kategori "Baik"

Sedangkan berdasarkan variabel partisipasi politik memiliki empat dimensi yaitu memberi suara pada pemilu, hadir dalam rapat umum, menjadi anggota partai politik dan mengadakan hubungan dengan pejabat atau anggota parlemen menunjukkan bahwa Strategi KPU dengan studi kasus di Kecamatan Ciawi sudah berjalan optimal. Hal itu diketahui sesuai hasil rekapitulasi dari responden pegawai mendapatkan nilai rata-rata 4,24 dengan kategori "Sangat Baik" dan rekapitulasi jawaban masyarakat mendapatkan nilai rata-rata 3,44 dengan kategori "Baik". Jadi

kedua variabel memiliki hasil rekapitulasi dari jawaban responden pegawai mendapatkan nilai total rata-rata 3,76 dengan kategori "Baik" dan hasil rekapitulasi jawaban responden masyarakat mendapatkan nilai total rata-rata 3,55 dengan kategori "Baik". Hasil tersebut didapatkan dengan penyebaran anget/kuesioner yang di isi responden dan di oleh menggunakan rumus WMS.

Berdasarkan hasil rata-rata hitungan kedua variabel diperoleh angka kriteria penafsiran tertinggi yaitu berada pada dimensi alokasi sumber daya terdapat 6 indikator untuk jawaban responden pegawai memperoleh nilai rata-rata sebesar 2,99 dengan kategori "Cukup Baik". Sedangkan untuk responden masyarakat memperoleh nilai sebesar 2,82 dengan kategori "Baik".

Hasil ini didukung dengan wawancara yang dilakukan kepada responden pegawai telah melakukan serangkaian kegiatan sosialisasi dengan baik kepada masyarakat. Sehingga masyarakat sebagai pemilih merasa terbantu dengan serangkaian kegiatan sosialisasi kepemiluan yang dilakukan KPU Kabupaten Bogor bersama PPK dan PPS Kecamatan Ciawi. Selain sosialisasi yang dilakukan secara langsung atau tatap muka sosialisasi juga gencar dilakukan dengan media seperti media cetak dan elektronik. Ini membuktikan bahwa dalam melaksanakan serangkaian kegiatan sosialisasi dilakukan dengan berbagai cara agar masyarakat dalam melaksanakan pemilu dapat berjalan dengan apa yang telah dirancang oleh KPU Kabupaten Bogor.

2. Hambatan KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi

Berdasarkan hasil penelitian diketahui terdapat beberapa hambatan yang muncul dari strategi yaitu sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai KPU Kabupaten Bogor. Jumlah pegawai KPU di Kabupaten Bogor sebanyak 26 orang dengan pembagian beban kerja yang disesuaikan namun dengan luasnya cakupan Kerja KPU Kabupaten Bogor dengan 40 Kecamatan terkadang membuat pegawai KPU Kabupaten Bogor mempunyai

beban kerja dan waktu kerja yang cukup padat sehingga berdasarkan jawaban responden dari pegawai KPU Kabupaten Bogor masih kurang memadai. Meski dalam menjalankan tugas KPU Kabupaten Bogor dibantu oleh badan ad hok seperti PPK dan PPS tapi tidak menutup kemungkinan jika jumlahnya kurang memadai masih akan menghambat kinerja.

2. Finansial. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai KPU Kabupaten Bogor keterbatasan anggaran merupakan salah satu kendala yang dirasakan oleh KPU Kabupaten Bogor. Mengingat dengan luas wilayah dan kepadatan penduduk yang ada di Kabupaten Bogor memerlukan penguatan anggaran yang dimaksimalkan.
3. Kurangnya kesadaran pemilih. Meski sosialisasi pelaksanaan pemilu senantiasa sering dilakukan sebelum pemilu, akan tetapi masih ada pemilih partisipasi yang acuh dan pasif dalam pelaksanaan pemilu.
4. Masih belum meratanya kegiatan sosialisasi. Meskipun sosialisasi kepemiluan gencar dilaksanakan KPU Kabupaten Bogor tapi bahwa sosialisasi yang dilakukan masih belum menyeluruh untuk semua lapisan masyarakat, melihat dengan jumlah pegawai KPU Kabupaten Bogor yang terbatas ditambah dengan banyaknya jumlah pemilih serata luasnya cakupan daerah di Kabupaten Bogor juga menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan sosialisasi demi meningkatnya partisipasi pemilih tahun 2024.

3. Upaya KPU Kabupaten Bogor Dalam Meningkatkan Partisipasi

Upaya yang bisa dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk jumlah pegawai dengan beban kerja dalam melaksanakan tugas di sesuaikan sehingga dengan jumlah pegawai KPU yang sangat terbatas akan tetapi jika tugas yang diberikan tidak dengan beban kerja yang berat maka tugas tersebut akan tetap berjalan dengan baik.
2. Untuk finansial penunjang pelaksanaan pemilu di kabupaten bogor harus senantiasa menjadi perhatian dari pemerintah dan juga KPU RI mengingat Kabupaten Bogor dengan kabupaten terluas dengan ada sebagian daerah yang masih sulit ditempuh karena jarak dan akses. Selain itu kabupaten Bogor merupakan kabupaten dengan jumlah pemilih terbanyak sehingga dalam pelaksanaan pemilu perlu perhatian yang lebih dalam anggaran penunjang pemilihan umum.
3. Untuk meningkatkan kesadaran pemilih yang acuh dan pasif KPU Kabupaten Bogor senantiasa melakukan pendekatan kepada seluruh lapisan tingkat pemilih sesuai dengan kriteria dan usia pemilih dengan program pendekatan yang disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh pemilih.
4. Untuk sosialisasi yang masih belum merata yang dilakukan KPU kabupaten bogor, KPU Kabupaten bisa senantiasa mencapai bagian daerah terjauh yang ada di Kabupaten Bogor dengan dukungan finansial dan juga senantiasa bekerjasama dengan badan ad hoc KPU yaitu PPK dan PPS agar senantiasa memasifkan segala kegiatan dan serangkaian program sosialisasi.

KESIMPULAN

1. Strategi KPU Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih

Hasil rekapitulasi dari variabel langkah-langkah strategi dan partisipasi politik masyarakat menunjukkan hasil akhir berdasarkan jawaban responden dari pegawai mendapat rata-rata nilai sebesar 3,76 “Baik”. Untuk hasil dari rekapitulasi masyarakat mendapat nilai rata-rata 3,55 dengan kategori “Baik”.

Pada hal ini total nilai tertinggi dari responden pegawai terdapat pada dimensi Formulasi Jangka Panjang dan Pemilihan Tindakan dengan rata-rata 4,18 dengan kategori “Baik”. Untuk jawaban masyarakat dimensi Formulasi jangka panjang menjadi dimensi dengan nilai tertinggi dengan rata-rata 4,29 dengan kategori “Sangat Baik”.

Berdasarkan perhitungan variabel langkah-langkah strategi dan partisipasi politik masyarakat untuk responden pegawai yang memperoleh nilai terendah yaitu pada dimensi alokasi sumber daya. Pada dimensi ini terdapat 6 indikator, Saf yang memadai terdiri dari jumlah pegawai dan kompetensi, Finansial, Bahan Baku, Sarana dan Prasarana serta Teknologi dan informasi. Untuk responden pegawai mendapatkan nilai rata-rata sebesar 2,99 dengan kategori “Cukup Baik”. Sedangkan responden masyarakat yang mendapatkan nilai terendah adalah dimensi menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan pada dimensi ini memiliki tiga indikator yaitu, menjadi anggota partai, anggota kelompok kepentingan dan pengawas TPS. Untuk responden masyarakat memperoleh nilai 2,82 dengan kategori “Cukup Baik”.

2. Hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih yaitu berkenaan dengan jumlah pegawai, finansial pendukung pelaksanaan pemilu, sosialisasi masih kurang merata dan juga tingkat kesadaran pemilih masih perlu ditingkatkan.

3. Upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu memastikan bahwa jumlah pegawai sesuai dengan apa yang dibutuhkan di lapangan,

memastikan bahwa anggaran yang telah direncanakan untuk pelaksanaan pemilu bisa didapatkan dan digunakan dengan maksimal dalam pelaksanaannya, dengan dukungan finansial mampu meratakan kegiatan sosialisasi sampai ke seluruh penjuru desa di Kabupaten Bogor serta memastikan dengan serangkaian kegiatan sosialisasi tersebut mampu meningkatkan kesadaran politik pemilih dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu).

REFERENSI

Jurnal

Dewi Sri Lestrari. Tahun (2019) *Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2019 di Kabupaten Pinrang*

Khairatun Uma Daulay. Tahun 2021 *Strategi Humas Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Periode Tahun 2020-2014 Kabupaten Labuhanbatu*

Nugroho, Heru.(2015) *“Demokrasi Dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia.”* Jurnal Pemikiran Sosiologi;Vol 1 No 1;

Rafi Alra. Tahun 2023. *Upaya KPU kota Batu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilu 2024 (Analisis Yuridis Empiris PKPU No. 09 Tahun 2022)*

Rohimat, D., Rahmawati, R., Seran Goris G., (2017) *Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Program Kotaku/PNPM Di Kecamatan Ciawi.* Jurnal Governansi 3(2) 71-80.

Salbiah, E., Purnamasari, I., Fitriah, M., & Agustini, A. (2020). *Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pertanahan.* Jurnal Governansi, (6(1), 36-42.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D.* Alfabeta

Peraturan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Tahun 2021